KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI KEMENTERIAN KOORINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Nomor: 1 /Pansel-JPT-Polhukam/5/2019

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. JPT yang lowong
   a. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan
   b. Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
2. Persyaratan umum
   1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
   2) Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 31 Juli 2019;
   3) Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk. I (IV/b) dan pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
   4) Sekurang-kurangnya telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III atau yang disetarakan, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II;
   5) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
   6) Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   7) Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang;
   8) Memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;

9) Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1), diutamakan Magister/Pascasarjana (S-2);
10) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11) Sehat jasmani dan rohani;
12) Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp. 6000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Persyaratan khusus
   a. Untuk Jabatan Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan memiliki pengalaman dan penugasan dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pendayagunaan aparatur.
   b. Untuk Jabatan Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki pengalaman dan penugasan terkait rencana kerja dan anggaran, organisasi, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	**Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan**
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	**Eselon II.a**
3.	Unit Kerja	:	**Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur**

No	Kompetensi	Level
1	2	3
1.	Integritas	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi (Int. 4)
2.	Kerjasama	Membangun komitmen tim sinergi (K.4)

3.	Komunikasi	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan (K.4)
4.	Orientasi pada hasil	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya (O.4)
5.	Pelayanan Publik	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional (P.4)
6.	Pengembangan diri dan orang lain	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran (P.4)
7.	Mengelola perubahan	Memimpin perubahan pada unit kerja (M.4)
8.	Pengambilan Keputusan (PK)	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan mitigasi risiko (PK.4)

1.	Nama Jabatan	:	**Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan RI**
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	**Eselon II.a**
3.	Unit Kerja	:	**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

No	Kompetensi	Level
1	2	3
1.	Integritas	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi (Int. 4)
2.	Kerjasama	Membangun komitmen tim sinergi (K.4)
3.	Komunikasi	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan (K.4)
4.	Orientasi pada hasil	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya (O.4)

5.	Pelayanan Publik	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional (P.4)
6.	Pengembangan diri dan orang lain	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran (P.4)
7.	Mengelola perubahan	Memimpin perubahan pada unit kerja (M.4)
8.	Pengambilan Keputusan (PK)	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan mitigasi risiko (PK.4)

STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

1.	Nama Jabatan	:	**Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan**
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	**Eselon II.a**
3.	Unit Kerja	:	**Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur**
No	**Kompetensi**		**Level**
1	2		3
1.	Perekat Bangsa		Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi (M.4)

1.	Nama Jabatan	:	**Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan RI**
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	**Eselon II.a**
3.	Unit Kerja	:	**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

No	Kompetensi	Level
1	2	3
1.	Perekat Bangsa	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi (M.4)

4. Waktu dan Tata Cara Pendaftaran
   a. Pendaftaran dimulai tanggal 20 Mei 2019 ditutup pada tanggal 3 Juni 2019;
   b. Surat lamaran di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan dikirimkan melalui alamat email **kepeg@polkam.go.id** dengan melampirkan:
      1) Daftar Riwayat Hidup (sesuai dengan format terlampir);
      2) Salinan sah petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
      3) Salinan sah petikan keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
      4) Salinan sah penilaian prestasi kerja, dua tahun terakhir;
      5) Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (tautan contoh Surat Persetujuan terlampir);
      6) Salinan sah ijazah yang dipersyaratkan;
      7) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
      8) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
      9) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang;
      10) Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.
   c. Surat lamaran beserta lampirannya (dalam bentuk *hardcopy*) sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dikirimkan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jln. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat 10110, dan diterima paling lambat tanggal 3 Juni 2019;
   d. Untuk tahapan seleksi akan diumumkan lebih lanjut melalui situs Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, **www.polkam.go.id**

5. Ketentuan Lain-Lain

   a. Selama proses seleksi, pelamar tidak dipungut biaya dan panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pelamar.

   b. Panitia Seleksi tidak melayani surat-menyurat dan korespondensi lainnya.

   c. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 20 Mei 2019

Ketua Panitia Seleksi,

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN RI

Agus S.B., M.I.Kom.